

REORGANISASI STRUKTUR PEMERINTAHAN DI DAERAH PEMEKARAN

Studi kasus Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat

Efrianto. A*

Ahmal. **

Abstract

Reformation has rised the spirit of outonomy in local area. The Local Outonomy rules with Law of 22th 1999 year, Law of 25th 1999 year and also the 129th year 2000 of Government Regulation. That Regulation has caused the change on Indonesia government system. Since 2007, there have been performed 167 regions and provinces. This Condition has been bringing to local society impacts because formed the new areas continued with forming lower local areas, till lowerst areas of goverment. This research descripts the change on South Solok Region after it have been formed and opened in 2003 year.

Keywords : local outonomy, local government, regions forming

Pendahuluan

Rakyat Indonesia saat ini menghadapi sebuah perubahan yang tak pernah terlintas akan menjadi sebuah ritunitas dalam kehidupan mereka. Saat ini, perubahan besar sedang terjadi baik di bidang politik, ekonomi dan segala aspek kehidupan masyarakat. Situasi ini jelas menarik untuk dicermati, sebab setiap perubahan akan selalu diikuti dengan perubahan baru, karena sebuah perubahan memiliki dimensi sebab akibat. Salah satu fokus pengamatan kita adalah tentang pemekaran daerah yang saat ini kembali menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Catatan sejarah perjalanan bangsa mengungkapkan bahwa pemekaran

wilayah di Indonesia sesungguhnya telah dimulai semenjak zaman kemerdekaan dan berlanjut hingga saat ini. Semangat yang mendorong terbentuknya sebuah daerah baru dari masa ke masa selalu sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, mempercepat pembangunan dan lain-lain. Usaha ini jelas memperlihatkan bahwa pemekaran dari dulu hingga kini selalu bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemekaran daerah di saat ini, terkait erat dengan pernyataan mundur Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Pernyataan mundur Soeharto telah membawa perubahan pada pola dan sistem pemerintahan di Indonesia.¹ Masa Soeharto dikenal dengan nama pemerintahan orde baru yang bercorak sentralisasi, di mana Jakarta merupakan penentu kebijakan di seluruh Indonesia. Saat itu, berbagai dalih dikemukakan untuk mempertahankan pemerintahan yang sentralisasi, antara lain stabilitas politik, efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi.

Era setelah Soeharto mundur diberi nama dengan zaman reformasi yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk menentukan sikap sendiri. Kebijakan ini sejalan dengan keluarnya Undang-undang (UU) No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.² Kedua UU tersebut menyebabkan beralihnya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke sistem pemerintah yang desentralisasi, kondisi tersebut memunculkan berbagai wacana dan kebijakan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kebijakan yang berkembang adalah pembentukan daerah baru yang terpisah dari wilayah induknya, seperti pembentukan provinsi dan kabupaten baru.

Wacana dan ide-ide pembentukan daerah baru yang muncul saat ini perlu dikritisi agar tujuan dari pembentukan daerah tersebut dapat dicapai. Pembentukan kabupaten baru, ternyata disusul dengan pembentukan kecamatan baru dan pembentukan desa/nagari baru. Hal ini menarik untuk dicermati, karena pembentukan daerah baru ditingkat yang lebih kecil akan

-
- Penulis adalah Pengkaji pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional (BPSNT) Padang
 - Pengajar pada Jurusan sejarah Universitas Riau dan Mahasiswa Pasca Sarjana Unand

¹ *Harian Singgalang* tanggal 22 Mei 1998

² Puspa Delima Amri (1999), *Makalah Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*, Departemen Ekonomis CSIS Jakarta

menimbulkan efek di tingkat lokal. Pembentukan daerah baru di tingkat yang lebih rendah, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di tingkat lokal, di masa depan akan menimbulkan masalah. Hal ini akan menyebabkan tujuan dari pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah yang ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat diwujudkan.

Pembentukan wilayah baru berawal dari semangat desentralisasi, yang berujung pada otonomi daerah. Desentralisasi adalah pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengambil keputusan, kondisi ini meningkatkan *political equality* di tingkat lokal. *Political equality* dalam desentralisasi merupakan kontribusi dari penguatan demokrasi lokal, dimana masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan suaranya dalam pemilihan dan pengambilan keputusan, membentuk asosiasi politik dan menggunakan hak kebebasan berbicara³. Kesempatan berpartisipasi yang lebih besar bagi masyarakat merupakan konsekuensi logis dari perpindahan tempat pengambilan keputusan dari pemerintah nasional kepada pemerintah lokal.

Tulisan ini akan mencoba mengungkapkan reorganisasi struktur pemerintahan yang sedang berlangsung di Sumatera Barat. Berdasarkan Undang-undang No. 38 tahun 2003 di Sumatera Barat telah terbentuk tiga kabupaten baru. Kabupaten Solok Selatan, pemekaran dari Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Pasaman Barat, pemekaran dari Kabupaten Pasaman. Sebelum tahun 2003, tepatnya tahun 1999 di Sumatera Barat telah terjadi pemekaran kabupaten baru dengan berdirinya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman.

Fokus kajian ini akan melihat reorganisasi struktur pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan. Solok Selatan ditetapkan sebagai fokus kajian karena reorganisasi pemerintahan di kawasan ini jauh lebih besar, sedangkan di Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Dharmasraya belum terjadi

³ Tanpa Nama Pengarang (2004), *Laporan Penelitian Evalausi Kinerja Pembangunan Pra dan Pasca Pemekaran Wilayah Studi Kasus Kabupaten Taksimalaya Bandung*, Jakarta, LSM Partnersihp dan Yappika. Diambil dari www.Partnersihp.com pada tanggal 7 Januari 2008

perubahan yang signifikan. Di Kabupaten Solok Selatan 12 nagari akan dikembangkan menjadi 32 nagari, sebuah nagari baru akan diikuti dengan pembentukan jorong-jorong. Pembentukan nagari baru akan disusul dengan pembentukan kecamatan baru.

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk mengkritisi kebijakan yang berlangsung di setiap kabupaten dan kota yang baru mengalami pemekaran. Terutama tentang, pembentukan nagari/desa baru dan mengevaluasi bagaimana proses pembentukan nagari untuk menghindari persoalan antar nagari di masa depan. Terciptanya stabilitas di tingkat lokal akan mempercepat pembangunan yang telah direncanakan, untuk itu perlu sebuah evaluasi terhadap setiap kebijakan yang sedang dijalani, untuk menghindari disharmonisasi di masa depan.

Pembahasan

Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan

Tanggal 18 Desember 2003 dan Tanggal 20 Agustus 2005 merupakan hari yang bersejarah dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Pada Tanggal 18 Desember 2003 keluar Undang-undang No. 38 tahun 2003 yang menyatakan bahwa Solok Selatan telah berdiri menjadi kabupaten sendiri, terpisah dari Kabupaten Solok. Pembentukan Kabupaten Solok Selatan telah diperjuangkan sejak tahun 1950 dengan digelarnya konferensi Timbulun di Kecamatan Sangir⁴, namun perjuangan saat itu belum berhasil. Pada tahun 1968 masyarakat Solok Selatan kembali melaksanakan konferensi yang bertempat di Gedung Nasional Muaro Labuh. Hasil konferensi ini telah disampaikan ke Departemen Dalam Negeri dan dicatat dalam buku agenda dengan nomor agenda 76, namun perjuangan untuk pembentukan kabupaten sendiri tetap belum berhasil.⁵

Lahirnya Orde reformasi yang diikuti dengan keluarnya Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta Peraturan

⁴ Badan Arsip Propinsi Sumatera Barat (2002) *Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Kecamatan Sangir dalam Himpunan Arsip Proses Pembahasan dan Penetapan Pengajuan Usulan Pemekaran Kabupaten Solok* (Arsip Propinsi Sumatera Barat)

⁵ *ibid*

Pemerintah (PP) 129 tahun 2000 tentang kriteria pembentukan pemekaran, penghapusan serta penggabungan daerah. Lahirnya dua kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Solok Bahagian Selatan untuk membentuk daerah baru. Pada tahun 2000 masyarakat Solok Selatan kembali menyuarkan keinginan mereka untuk berpisah dengan Kabupaten Solok, hal itu dituangkan dengan mengadakan pertemuan di Muaro Labuh. Ide pembentukan Kabupaten Solok Selatan ini mendapat respon dari seluruh masyarakat Solok Selatan baik di kampung halaman maupun di rantau. Pada tahun 2002 masyarakat Solok Selatan membentuk Badan Pengerak Pemekaran Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) yang bertugas untuk mempercepat proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan.

Perjuangan BP2KS2 mendapat respon dan tanggapan dari Bapak Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok dan para anggota DPRD Kabupaten Solok, hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya surat pernyataan Bupati Solok pada tanggal 25 Juli 2002 yang setuju dan merekomendasikan pembentukan Kabupaten Solok Selatan. Pada tanggal 29 Juli 2002 DPRD Kabupaten Solok mengeluarkan surat keputusan Nomor: 08 tahun 2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Solok menjadi dua bahagian. Berdasarkan persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Solok, proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat ke Presiden. Akhirnya perjuangan yang dilakukan masyarakat Solok Selatan dapat terwujud dengan keluarnya UU No. 38 tahun 2003.

Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti biji besi, emas, tembaga. Topografis wilayahnya yang berbukit-bukit menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan perkebunan yang membuka lahan di kawasan ini, terutama untuk perkebunan teh dan sawit. Di kawasan ini terdapat lima perusahaan besar, yaitu: PT. Perkebunan Nusantara VI, PT. Tidar Kerinci Agung (TKA), PT. Tidar Sungkai Sawit (TSS), PT. Sumatera Jaya Agro Lestari (SJAL), dan PT Bina Pratama Sakato Jaya 11 (BPSJ II)⁶.

⁶ Nagari Sungai Kuyit terkaya, tapi terisolir di Solok Selatan (2005) berasal dari <http://www.solok-selatan.com/content/view/150/59/> di donwload 25 April 2008

Di samping kaya dengan sumber daya alam dan perkebunan kawasan ini juga memiliki kekayaan budaya dan peninggalan yang bernilai historis. Semua potensi tersebut akan dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Solok Selatan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Aliman Salim ketika beliau ditunjuk menjadi Pejabat Bupati Solok Selatan, Solok Selatan merupakan kabupaten yang kaya dengan Sumber Daya Alam. Pernyataan ini didukung dengan kenyataan ketika Solok Selatan, masih menjadi bahagian dari Kabupaten Solok, mereka penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di kabupaten Solok. Jika semuanya mampu dimanfaatkan secara maksimal dan tepat, maka cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Solok Selatan akan segera terwujud.

Pembentukan Kabupaten Solok Selatan, disusul dengan pembentukan struktur pemerintahan yang akan menjalankan roda pemerintahan, mulai dari yang tertinggi (bupati dan wakil bupati) hingga terendah (*wal nagari dan walijorong*). Mereka inilah yang bertugas untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki dan mewujudkan cita-cita pembentukan Kabupaten Solok Selatan. Untuk melaksanakan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati, pada bulan Juni tahun 2005 masyarakat Kabupaten Solok Selatan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA).

Undang-undang pemilu menyatakan bahwa partai yang memiliki jumlah suara 15 % berhak mengajukan calon untuk menjadi bupati dan wakil bupati, untuk mengikuti PILKADA. berdasarkan pemilu 2004 menempatkan Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai partai penguasa di Solok Selatan, dari 25 kursi di DPRD, Partai Golkar menempatkan 12 orang kadernya. Sedangkan partai lain terpaut jauh dengan Partai Golkar. Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera tiga kursi, disusul Partai Amanat Nasional dan Partai Bulan Bintang, masing-masing dua kursi. Sedangkan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) masing-masing satu kursi⁷.

Komposisi anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan menempatkan

⁷. Media Indonesia Online (2005) “Pilkade Solok Selatan Mencari Bupati yang Pekerja Keras, diambil dari www.solokselatan.com pada tanggal 28 Juli 2008

hanya partai Golkar yang berhak mengajukan calonnya, sedangkan partai lain mesti berkoalisi dengan partai lainnya. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Solok Selatan, akhirnya KPUD menetapkan 4 calon bupati (cabup) dan wakil bupati (wabup) yaitu : Koalisi PKS dan PKPI mencalonkan Wakil Kepala Dinas Perhubungan Sumbar Syafrizal sebagai cabup berpasangan dengan Nurfirmansyah, anggota DPRD Sumbar, sebagai cawabup. Sementara PPP dan PDIP mengukung Asisten I Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Yusrizal Salta berpasangan dengan Yon Karnedi (pengusaha). PBB yang memperoleh 4,98% dari total 56.745 suara sah pada Pemilu Legislatif 2004, bergabung dengan PKB yang memperoleh 2,32% suara. Dua partai itu ditambah sekitar 12% suara dari delapan partai kecil mengukung Muhammad Tulus dan Mursiwal Bagindo Kayo sebagai cabup dan cawabup. Sedangkan Partai Golkar mencalonkan anggota DPRD Solok Selatan, Zulkhairi Datuk Marajo berpasangan dengan Bustami Narda⁸.

Dalam Pilkada, Empat pasang calon tersebut akan memperebutkan 87918 pemilih di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuhan, Kecamatan Sangir Batang Hari. Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan terhadap seluruh masyarakat Solok Selatan, maka ditetapkan peraih suara terbanyak adalah pasangan Syafrizal dan Nurfirmansyah sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan ini berhasil meraih suara 20.639 suara / 36 % jumlah pemilih⁹, jauh meninggalkan pasangan lain.

Pada tanggal 20 Agustus 2005, Syafrizal dan Nurfirmansyah secara resmi dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat, sebagai bupati dan wakil bupati pertama di Kabupaten Solok Selatan. Sebagai bupati di daerah pemekaraan, banyak kebijakan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Solok Selatan, agar tujuan dari pembentukan Kabupaten Solok Selatan dapat diwujudkan. Salah

⁸ Padang Ekspres, (2005) "*Empat Calon Siap Bertarung*" diambil dari www.solokselatan.com pada tanggal 28 juli 2008

⁹ Tanpa Pengarang (2005) "*Hasil Pilkada Kabupaten dan Kota Di Indonesia* diambil dari laporan KPUD Kabupaten Solok Selatan.

satu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah reorganisasi sistem dan struktur pemerintahan di tingkat bawah dengan cara membentuk kecamatan baru dan nagari-nagari baru.

Perubahan Struktur Pemerintahan

Untuk mempercepat pembangunan di kawasan Solok Selatan pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan melakukan kebijakan untuk memperbanyak jumlah nagari dan kecamatan. Hal ini sejalan dengan semangat yang mendorong kabupaten Solok Selatan untuk berdiri sendiri, luas wilayah dan kekayaan alam yang mereka miliki belum mampu dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2005 Kabupaten Solok Selatan terdiri dari 12 Nagari dan 136 jorong yang menyebar di lima (5) kecamatan. Dua Belas nagari tersebut adalah Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Malako, Nagari Bidar Alam, Nagari Sungai Kunyit, Nagari Abai, Nagari Dusun Tengah, Nagari Lubuk Ulang Aling, Nagari Koto Baru, Nagari Alam Pauh Duo, Nagari Pasir Talang, Nagari Sako Pasir Talang dan Nagari Pakan Raba'a, sedangkan lima (5) kecamatan itu adalah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir. Kecamatan Sangir Jujuhan dan Kecamatan Sangir Batanghari. Pada akhir tahun 2005, DPRD Kabupaten Solok Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tentang pemerintahan nagari¹⁰. Perda tersebut memberi kesempatan kepada beberapa jorong untuk bergabung dan meningkatkan statusnya dari jorong ke nagari.

Perda No. 4 tahun 2005 tersebut mendorong munculnya ide pembentukan nagari baru di Solok Selatan. Pada tahun 2006, pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menerima aspirasi masyarakat dari beberapa jorong untuk membentuk nagari tersendiri yang terpisah dari nagari induk. Aspirasi ini ditindaklanjuti dengan mengajukan usul kepada DPRD Kabupaten

¹⁰ Padang Ekspres (2007), Direncanakan SolseI Miliki 32 Nagari, <http://www.solok-selatan.com> pada tanggal 14 Mei 2008

Solok Selatan untuk menggesahkan pembentukan 9 nagari baru. Sampai bulan Januari 2007 di Kabupaten Solok Selatan telah terjadi penambahan satu Kecamatan baru yaitu Kecamatan Alam Pauh Duo dan 16 nagari baru yaitu Nagari Ranah Pantai Cermin, Nagari Sitapus, Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan. Nagari Talao Sungai Kunit, Nagari Sungai Kunit Barat. Nagari Padang Limau Sundai, Nagari Padang Air Dingin, Nagari Pakan Rabaa Utara, Nagari Pakan Rabaa Tengah, Nagari Pakan Rabaa Selatan, Nagari Pasar Muara Labuh, Nagari Pulakek Koto Baru, Nagari Kapau Alam Pauh Duo, Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, dan Nagari Pauh Duo Nan Batigo¹¹.

Nagari-nagari tersebut diberikan waktu oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar selama satu tahun, telah membentuk pemerintahan nagari yang defenitif. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, berencana akan terus membentuk nagari-nagari baru, karena mereka merencanakan akan membentuk 32 Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Di samping meningkatkan jumlah nagari, Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan juga meningkatkan jumlah kecamatan dari 5 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

Hakikat pemekaran nagari dan pembentukan kecamatan baru adalah meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dalam rangka mewujudkan otonomi nagari yang bertanggung jawab serta mempercepat tumbuh dan berkembangnya demokrasi di tingkat nagari. Pemekaran nagari yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan sejak pertengahan Desember 2006 hingga Januari 2008 merupakan upaya memenuhi kebutuhan mendesak dalam pemerintahan. Pasalnya, untuk melengkapi administratif pemerintahan, daerah yang baru menjadi kabupaten ini membutuhkan pengembangan di segala bidang.

Pembentukan nagari-nagari baru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mestinya mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Sebab nagari dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) bukan merupakan kejadian yang bisa diciptakan. Terbentuknya sebuah nagari harus melalui proses yang panjang, diawali dengan pembentukan

¹¹ *Ibid*

Taratak, kedua Dusun, ketiga Koto dan keempat Nagari. Taratak berasal dari kata “Tetak”, dusun berasal dari kata “susun”, Koto berasal dari kata “sakato” dan nagari berasal dari kata “pagar” atau “dipagari”, yaitu dipagari dengan adat dan undang-undang¹².

Peraturan diatas, jelas memperlihatkan bahwa yang mendorong pembentukan nagari harus berasal dari keinginan masyarakat di tingkat terendah dan mereka telah memiliki susunan adat serta peraturan tersendiri yang dihasilkan melalui keputusan bersama. Pembentukan nagari bukanlah berdasarkan pendekatan kebijakan dan memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat saja atau untuk mensukseskan program yang telah ditetapkan, namun melalui kesadaran yang timbul dari seluruh masyarakat tentang pentingnya mereka membentuk sebuah nagari.

Nagari juga memiliki berbagai persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nagari di Minangkabau. Sebuah nagari dipandang sah bila memenuhi syarat-syarat yang disimpulkan dalam tujuh hal. Ke tujuh hal tersebut memiliki maksud tersendiri seperti: *dusun* – *taratak* maksudnya adalah lambang pemerintahan. *labuah* – *tapian Labuah* artinya urusan hubungan lalu lintas sebagai urat nadi perekonomian menurut adat. *Tapian* adalah lambang kesehatan. Sawah - Ladang lambang pertanian. *banda* - *buatan* lambang pengairan. *Kabau, Jawi - Tabek*, Taman-Taman lambang peternakan. *Balai* – *Musajik*, *balai* adalah lambang hukum dan mufakat. Sedangkan *musajik* adalah lambang agama. *Galanggang* - *pamedanan*. *Galanggang* adalah lambang olahraga. Sedangkan *pamedanan* adalah tempat berhimpun¹³.

Undang-undang tersebut jelas mengungkapkan, bahwa pembentukan nagari mesti memenuhi standar-standar tertentu yang tidak bisa dipaksakan, sebab pembentukan nagari akan diikuti dengan kewajiban-kewajiban dan kesanggupan mereka untuk bisa mandiri. Sebuah nagari akan didukung dengan terbentuknya struktur-struktur lembaga-lembaga penunjang agar keberhasilan sebuah nagari dapat diwujudkan, seperti Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN), *Tungku Tigo Sajaringan*, Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam

¹² Gufron, Nagari di Minangkabau (2008) diambil dari <http://ranah-Minang.info/content.php?article.23> pada tanggal 15 mai 2008

¹³ *Ibid*

sistem pemerintahan nagari, sebuah keputusan bukan berasal dari seseorang, namun hasil musyawarah dari elemen masyarakat di dalam nagari.

Pembentukan nagari yang berlangsung saat ini, secara adat dibenarkan. Namun mesti memperhatikan sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan akibat pembentukan nagari. Pemekaran nagari akan diikuti dengan persoalan pembagian aset kekayaan nagari, sebab nagari mesti memiliki aset yang bisa dikembangkan dan sebuah nagari mesti memiliki berbagai aset, seperti pasar, mesjid, galanggang, tanah ulayat dan lain-lain.

Pembagian tanah merupakan persoalan sulit untuk mencari penyelesaiannya. Bagaimanapun juga tanah merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak di masa depan, jumlah penduduk yang terus bertambah dan kebijakan pemerintah yang mengarahkan pembangunan pada sektor pertanian dan perkebunan, membuat kebutuhan masyarakat akan tanah menjadi meningkat. Jelas kondisi ini akan menjadi persoalan di masa depan, jika pemekaran nagari dilaksanakan tidak memperhatikan aspek budaya, adat dan kultur yang terdapat di wilayah tersebut.

Pemekaran yang dilaksanakan saat ini, harus jelas, sebab ada kekhawatiran pemekaran nagari yang tengah berlangsung di Solok Selatan, merupakan *pengulangan* sejarah yang pernah dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat, dengan program *desanisasi* sehingga Gubernur Sumatera Barat mengubah 3.183 jorong yang bernaung di bawah nagari menjadi desa. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan amanat dalam Undang-undang No. 5 tahun 1979 yang mengharuskan pemerintah terendah di seluruh Indonesia adalah desa. Pertimbangan lain yang dilakukan Gubernur dalam melakukan *desanisasi* adalah untuk meningkatkan bantuan yang diterima Sumatera Barat dari dana inpres (instruksi presiden) sehingga jumlah nagari yang saat itu hanya 543 nagari, lalu “dimekarkan” menjadi 3.183 desa¹⁴.

Dampak yang timbul akibat kebijakan *desanisasi* adalah Sumatera Barat kehilangan ciri egaliter, mandiri, dan berorientasi ke masyarakat (kerakyatan), sejak pemberlakuan pemerintahan desa, sikap masyarakat justru berubah menjadi hierarkis, tergantung dan berorientasi ke atas/pejabat.

¹⁴ Majalah Gatra (1999), *Dari Jorong Kembali ke Nagari* Nomor 14/V, 20 Februari 1999

Lembaga-lembaga tradisional yang tadinya berperan aktif dalam masyarakat, ketika menjadi desa unsur-unsurnya hanya menjadi pajangan kalau pejabat turun ke desa. Semangat gotong-royong yang tadinya bersifat komunal dan spontan berubah menjadi gotong-royong yang dimobilisasi dan dikomandokan dari atas.

Inilah yang ditakutkan ketika pembentukan nagari-nagari baru yang berlangsung di Solok Selatan saat ini, ternyata lebih dititik beratkan kepada bagaimana sebuah jorong atau beberapa jorong memiliki kesempatan untuk menerima bantuan Dana Alokasi Umum Nagari (DAUN), yang masing-masing nagari berkisar 100-200 juta/pertahunnya. Dampak yang akan ditimbulkan adalah desharmonisasi antara nagari induk dengan nagari pemekaran. Kita tentu tidak menginginkan peristiwa perkelahian antar nagari karena batas nagari yang tidak jelas atau rebutan tanah ulayat menjadi sebuah tontonan di masa depan, sebab ke dua nagari merasa sama-sama berhak. Kasus konflik antara Nagari Saningbaka dengan Nagari Muaro Pingai merupakan sebuah pembelajaran, kasus ini berawal dari belum jelasnya status pembagian tanah ulayat antar ke dua nagari, padahal ke dua nagari merupakan nagari yang saling terkait secara adat.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mestinya arif menyikapi usulan pembentukan nagari-nagari baru yang saat ini berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah dan DPRD harus menekankan pada kesiapan dari jorong-jorong yang ingin meningkatkan status mereka menjadi nagari dan faktor apa yang mendorong masyarakat mengusulkan pembentukan nagari baru. Bukan berorientasi pada bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dan terealisasi, sebab kembali ke nagari merupakan sebuah impian bagi seluruh masyarakat di Sumatera Barat, baik di kampung halaman maupun di rantau untuk kembali membangkitkan jatidiri.

Penutup

Pembentukan Kabupaten Solok Selatan telah diupayakan oleh masyarakat Solok bagian selatan semenjak tahun 1950. Cita-cita ini baru dapat diwujudkan dengan keluarnya Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten

Dharmasraya, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Kabupaten Solok Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok. Daerah ini merupakan daerah kaya, hal itu dibuktikan dengan sumbangsih 40% Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok berasal dari daerah yang saat ini bernama Kabupaten Solok Selatan. Di samping itu, daerah ini memiliki kekayaan alam seperti logam emas, timah hitam, bijih besi, tembaga, mangan serta perak, timah hitam, bijih besi.

Lahirnya Kabupaten Solok Selatan membawa dampak terhadap struktur pemerintahan mulai dari lahirnya bupati baru, hingga munculnya wali nagari baru, sebab berdirinya kabupaten baru akan disusul dengan terbentuknya kecamatan baru hingga nagari-nagari baru. Pada tahun 2007 saja di Solok Selatan telah terdapat 16 wali nagari baru. Nagari merupakan sebuah komunitas yang kompleks, untuk itu pembentukan nagari mesti dipahami secara adat dan kultur sehingga tidak menimbulkan masalah dimasa depan. Kita tentu berharap terbentuknya nagari yang saat ini begitu gencar terjadi di Solok Selatan, juga memperhatikan aspek-aspek terburuk yang bisa terjadi di kemudian hari.

Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus bekerjasama dan bergotong royong untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, sehingga tujuan dari pembentukan Kabupaten Solok Selatan yang diperjuangkan semenjak tahun 1950 dapat diwujudkan. Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) akan sulit dioptimalkan jika semua masyarakat belum memiliki pemahaman yang sama tentang wilayah dan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Struktur pemerintahan yang terbentuk hari ini, harus mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mesti melakukan pengkajian yang mendalam tentang reorganisasi struktur pemerintahan yang sedang berlangsung. Evaluasi dan pengawasan yang transparansi terhadap nagari-nagari yang baru dibentuk tetap dilaksanakan. Nagari merupakan unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di tingkat lokal. Untuk itu berdirinya sebuah nagari harus berdasarkan aspirasi dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Pembentukan nagari baru, sebaiknya tidak hanya memperhatikan

aspek administrasi, namun harus memperhatikan aspek sosial budaya yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Lahirnya nagari baru akan diikuti dengan persoalan pembagian aset antar nagari induk dan nagari baru, terutama aset yang memiliki potensi ekonomi. Kita mesti sadar munculnya sebuah nagari akan menimbulkan ego dan rasa memiliki yang kuat antar nagari, sehingga sangat memungkinkan timbulnya konflik jika pembentukan nagari hanya memperhatikan aspek administrasi, bukan berasal dari keinginan seluruh masyarakat di kawasan tersebut.

Di masa depan Solok Selatan akan menjadi kekuatan ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat, sebab daerah ini masih memiliki sumber daya alam, sejarah dan budaya yang belum dioptimalkan. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk memberikan kemudahan bagi investor untuk menanam modalnya di kawasan ini. Untuk itu semua harus berfikir atas kepentingan bersama, masa depan Solok Selatan tergantung dari kemauan kita menciptakan suasana yang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Tanpa Nama Pengarang (2004), *Laporan Penelitian Evalausi Kinerja Pembangunan Pra dan Pasca Pemekaran Wilayah Studi Kasus Kabupaten Taksimalaya Bandung*, Jakarta, LSM Partnersihp dan Yappika. Diambil dari www.Partnersihp.com pada tanggal 7 Januari 2008
- Tanpa Pengarang (2005) “*Hasil Pilkada Kabupaten dan Kota Di Indonesia* diambil dari laporan KPUD Kabupaten Solok Selatan.
- Badan Arsip Propinsi Sumatera Barat (2002) *Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Kecamatan Sangir dalam Himpunan Arsip Proses Pembahasan dan Penetapan Pengajuan Usulan Pemekaran Kabupaten Solok* (Arsip Propinsi Sumatera Barat)
- Gufron, Nagari di Minangkabau (2008) diambil dari <http://ranah-Minang.info/content.php?article.23> pada tanggal 15 mai 2008
- Harian Singgalang* tanggal 22 Mei 1998

- Majalah Gatra (1999), *Dari Jorong Kembali ke Nagari* Nomor 14/V, 20 Februari 1999
- Media Indonesia Online (2005), Pilkada Kabupaten Solok Selatan Mencari Bupati yang Pekerja Keras, <http://www.solok-selatan.com> di ambil tanggal 1 Februari 2008.
- Nagari Sungai Kunyit terkaya, tapi terisolir di Solok Selatan (2005) berasal dari <http://www.solok-selatan.com/content/view/150/59/> di donwload 25 April 2008
- Padang Ekspres (2007), Direncanakan Solsel Miliki 32 Nagari, <http://www.solok-selatan.com> pada tanggal 14 Mei 2008
- Puspa Delima Amri (1999), *Makalah Dampak Ekonomi dan Politik UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*, Depertemen Economis CSIS Jakarta